



PKL Abubakar Ali Menolak Direlokasi

JOGJA, BERNAS -- Para pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Abu Bakar Ali Kotabaru menolak rencana relokasi tempat jualan mereka yang berada di sisi barat jalan. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Indonesia (UII) pun memberikan dukungan sikap penolakan para PKL tersebut.

Ketua Tim Advokasi LKBH UII Agung Wijaya Wardhana menilai ada sejumlah kegagalan dalam upaya pengusuran ini. Salah satunya hasil pertemuan antara pihak pemerintah dengan para PKL pada 18 September lalu di Kantor Satpol PP yang memutuskan sepihak untuk melakukan pengusuran kepada 18 PKL Abubakar Ali. "Padahal belum ada sosialisasi, pedagang pun tak melanggar aturan apapun," katanya setelah belasan PKL Kotabaru mengadu ke kantornya, Jumat (29/9) lalu.

Menurut Agung Wijaya, tidak ada alasan jelas Pemkot Jogja enggan memperpanjang izin PKL sejak tahun 2014. Pihaknya pun telah berkirim surat minta klarifikasi kepada Pemkot Jogja terkait alasan dan dasar hukum pengusuran. Jika tak ada jawaban yang memuaskan, pihaknya bakal minta DPRD Kota Jogja untuk memfasilitasi proses klarifikasi. "Prinsip kami akan mendampingi pedagang hingga ada solusi terbaik. Se jauh ini pedagang masih ingin bertahan dan berdagang seperti biasa," ujarnya.

Sementara itu para PKL yang tergabung dalam Komite Perjuangan Pedagang Kaki Lima Anti Pengusuran (KPKP) menentang upaya pengusuran sepihak yang dilakukan oleh Pemkot Jogja. "Kami sudah sepatok akan bertahan sampai ada kejelasan soal alasan pengusuran," ujar Koordinator KPKP Agung Wibowo Budiono.

Menurutnya, aktivitas PKL Jalan Abubakar Ali sudah ada sejak tahun 1985 silam. Keberadaannya pun sudah dilindungi oleh Perda Kota Jogja Nomor 26/2002 tentang PKL yang tidak melarang bagi PKL membuka usaha di kanan-kiri Jalan Abu Bakar Ali. Bahkan para pedagang dipungut retribusi sampah dan parkir tiap bulan.

KPKP pun menuding ada muatan politis di balik upaya pengusuran ini. Sebab, dari total 28 PKL yang tergabung dalam Paguyuban PKL Kotabaru (PAPIKO), hanya 18 pedagang yang diminta angkat kaki paling lambat Sabtu (30/9), yakni blok barat Gereja Kotabaru, sedangkan sisanya di blok timur gereja sama sekali tak diutak-atik. "Seolah ada diskriminasi, upaya memecah belah kerukunan PAPIKO yang sudah terjalin selama puluhan tahun," tandasnya. ● (age)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005